

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

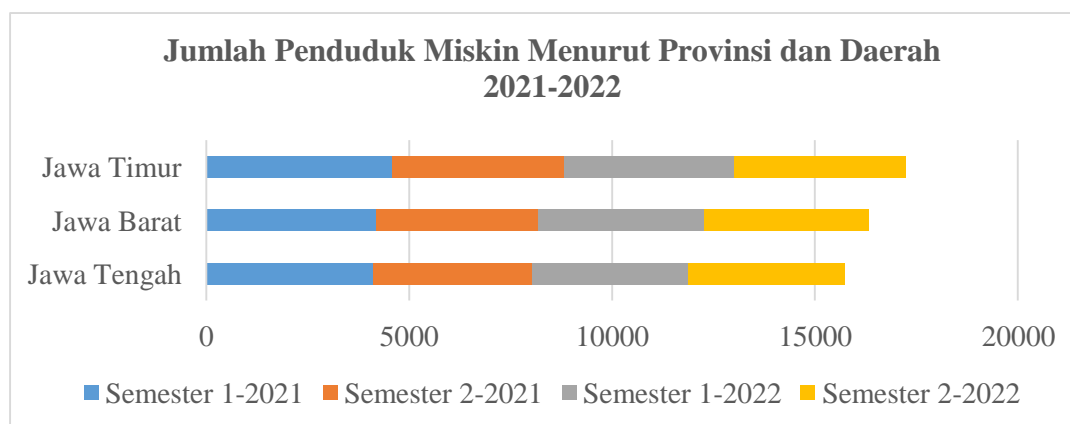
Kemiskinan merupakan permasalahan serius di banyak negara di dunia, khususnya di negara yang belum maju dalam (Priseptian & Primandhana, 2022). Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, bahan pakaian, tempat tinggal, dan berbagai macam obat (Hardinandar, 2019) dalam (Priseptian & Primandhana, 2022). Salah satu standar kondisi sosial dan ekonomi untuk menilai kesuksesan pembangunan pemerintahan di suatu daerah adalah adanya kemiskinan itu sendiri (Oktaviana et al., 2021) dalam (Priseptian & Primandhana, 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak. Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti meningkatnya kriminalitas, penurunan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat akibat minimnya penghasilan masyarakat miskin dalam (Kurnia Malta & Sutikno, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan per September 2022, total masyarakat miskin di Indonesia sebesar 26,36 juta jiwa. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan akhir Maret 2022 sebanyak 26,16 juta jiwa. Sekretaris BPS Margo Yuwono mengatakan proporsi masyarakat miskin meningkat 0,03 persen menjadi 9,57 persen pada September dari 9,54 persen pada Maret.

Sebaran kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Secara spesifik, sebagian besar masyarakat miskin tinggal di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk miskin mencapai 13,94 juta jiwa pada September 2022. Masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan Jawa dengan jumlah penduduk 8,03 juta jiwa dan total masyarakat miskin di perdesaan Jawa menggapai 5,91 juta jiwa dengan sebaran terbesar berada di Jawa Timur (Jatim). Berdasarkan data BPS, jumlah masyarakat miskin di Jawa Timur (Jatim) menggapai 4,24 juta jiwa.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230117090454-128405989/orang-miskin-ri-capai-2636-juta-paling-banyak-di-pulau-jawa>

(Diakses pada tanggal 05 September 2023).



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Diolah Peneliti 2023

Dari gambar diatas, hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata antar kelas sosial dan hanya sebagian kecil masyarakat yang mengalami pertumbuhan ekonomi dalam (Priseptian & Primandhana, 2022). Peningkatan angka kemiskinan di Jawa Timur disebabkan oleh banyaknya

jumlah masyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan keserataan masyarakat serta peluang bekerja (BPS Jawa Timur, 2021). Meningkatnya tarif kebutuhan sehari-hari akibat kelangkaan akibat pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini tidak hanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak merata tetapi juga menyebabkan ketimpangan distribusi pembangunan dan perbedaan pendapatan dalam (Priseptian & Primandhana, 2022).

Surabaya adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan Kota terbesar kedua di Indonesia setelah Kota Jakarta. Kota Surabaya mengalami perkembangan setiap tahunnya, antara lain pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini sering disebut-sebut oleh banyak orang sebagai alasan untuk pindah ke daerah ini. Banyaknya pendatang baru dan bertambahnya jumlah penduduk asli di Kota Surabaya sendiri telah menciptakan kekurangan lahan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan lahan. Secara tidak sengaja, hal ini pula yang menyebabkan Surabaya menjadi salah satu kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), total masyarakat miskin di Kota Surabaya pada tahun 2019 sebanyak 130.000 jiwa atau sekitar 4,51% dari total masyarakat.

https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/nasywanafiah_1605/61810a68ffe7b52d4324ec42/mengapa-masih-ada-kemiskinan-dikotasurabaya. (Diakses pada tanggal 5 September 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, proporsi masyarakat miskin di Surabaya sebesar 5,23% atau sebanyak 152.489 jiwa. Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 5,02%. Ada beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Kota Surabaya salah satunya adalah kegiatan perekonomian yang masih belum membaik akibat dampak dari pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan yang membatasi kegiatan masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi secara umum. Adapun data masyarakat yang termasuk dalam kategori Keluarga Miskin di 31 kecamatan Kota Surabaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Masyarakat Keluarga Miskin di 31 Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Data (Jiwa)
1.	Tambaksari	31.036
2.	Wonokromo	17.115
3.	Sukomanunggal	15.242
4.	Semampir	14.782
5.	Gubeng	12.547
6.	Simokerto	10.846
7.	Sawahan	10.258
8.	Tegalsari	10.051
9.	Krembangan	9.481
10.	Kenjeran	7.776
11.	Genteng	7.240
12.	Wonocolo	6.990
13.	Sukolilo	6.810
14.	Dukuh Pakis	6.550
15.	Pabean Cantian	6.094
16.	Bubutan	5.658
17.	Karang Pilang	5.650
18.	Sambikerep	5.487

No	Kecamatan	Jumlah Data (Jiwa)
19.	Asem Rowo	4.456
20.	Mulyorejo	4.140
21.	Bulak	3.324
22.	Wiyung	3.009
23.	Rungkut	2.685
24.	Tenggilis Mejoyo	2.504
25.	Tandes	2.219
26.	Jambangan	2.079
27.	Pakal	1.601
28.	Gunung Anyar	1.255
29.	Gayungan	1.092
30.	Lakarsantri	765
31.	Benowo	685

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, Diolah Peneliti 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 jumlah masyarakat Kota Surabaya yang termasuk dalam kategori Keluarga Miskin adalah sebanyak 219.427 jiwa. Kecamatan Tambaksari memiliki jumlah Keluarga Miskin terbanyak dibandingkan 31 kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 31.036 jiwa. Dalam (Setijaningrum et al., 2017), Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan. Instansi terkait yang telah meluncurkan program pengentasan kemiskinan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana/Bapemas KB, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan/Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Manusia/Dinas Sosial/Layanan Sosial dan Pendidikan/Kedokteran. Upaya pengentasan kemiskinan masih belum efektif. Sebab, berbagai program pengentasan kemiskinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya tidak

saling terkoordinasi. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan tidak bersifat sepihak. Banyak program yang dilaksanakan oleh SKPD yang berbeda-beda yang tumpang tindih dan tidak saling mendukung. Terdapat dua alasan utama mengapa program pengentasan kemiskinan tidak efektif: 1) belum adanya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, dan 2) program pengentasan kemiskinan tersebut masih belum mencerminkan kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak dalam (Setijaningrum et al., 2017). Seperti yang tertulis dalam artikel suarasurabaya.net.

“...Reni menyampaikan bahwa Pemerintah Kota sudah banyak melakukan tindakan intervensi terhadap Keluarga Miskin. Namun masih ada yang belum dilaksanakan yakni bantuan pangan, transportasi, serta pemberdayaan untuk penguatan produktivitas pendapatan dengan menggali potensi Keluarga Miskin.”

<https://www.google.com/amp/s/www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/pimpinan-dprd-paparkan-3-strategi-upaya-menangani-kemiskinandisurabaya/%3famp>. (Diakses pada tanggal 19 September 2023).

Hal ini juga sejalan dengan yang tertulis dalam artikel kompas.id.

“...Secara terpisah, Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi sekaligus Dekan FISIP Universitas Airlangga, mengingatkan bahwa tekad dan perjuangan masyarakat Surabaya untuk menjadi Kota Metropolitan yang modern dan maju akan terus menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendalanya adalah mentalitas negatif yang hidup dalam masyarakat, yakni lebih memilih berpangku tangan dan menunggu bantuan.”

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/17/surabayaterusberjuang-untuk-merdekadarkemiskinan?status=sukses_login&status_login=login (Diakses pada tanggal 19 September 2023).

Program pengentasan kemiskinan harus mendukung dan memberdayakan masyarakat miskin melalui pembangunan ekonomi dan perbaikan ekonomi sehingga meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang partisipasi dalam proses pembangunan. Melihat kembali karakteristik ekonomi masyarakat miskin, masyarakat miskin biasanya bekerja bergantung pada pekerjaan dan hanya bertujuan untuk menyelamatkan mereka dari kelaparan tanpa memikirkan peningkatan produktivitas yang juga membantu meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan harus mampu mengubah persepsi tersebut. Masyarakat miskin harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitasnya tidak hanya dengan bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga berupaya meningkatkan perekonomian di masa depan.

Program pemberdayaan masyarakat saat ini menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satu program yang memberikan dampak besar terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya adalah Program Padat Karya. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023, Pasal 1 Ayat 19 menyebutkan Padat Karya adalah kegiatan produktif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat keluarga miskin berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat. Program padat karya diharapkan dapat semakin menstimulasi perekonomian sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi

kemiskinan. Program padat karya ini akan dilaksanakan dengan memanfaatkan aset Pemerintah Kota Surabaya dengan memberikan prioritas kepada pekerja dari Keluarga Miskin yang belum bekerja. Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan lahan aset di 31 kecamatan untuk Rumah Padat Karya. Ira Tursilowati selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya, menyatakan bahwa seluruh aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupa lahan telah tersebar di sekitar Kota Surabaya sejumlah 64.496.98,25 Meter Persegi (m²). Sebanyak 9.555.372 m² lahan kosong atau setara dengan 15% dari jumlah keseluruhan lahan milik Pemkot Surabaya telah dimanfaatkan untuk pembangunan Rumah Padat Karya. Rumah Padat Karya yang telah diresmikan telah tersebar pada 20 lokasi di berbagai wilayah Kota Surabaya pada tahun 2022 (Hakim, 2022) dalam (Putricia & Prathama, 2023). Klasifikasi usaha Rumah Padat Karya dapat disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Adapun data sebaran Klasifikasi Rumah Padat Karya Kota Surabaya beserta jenis usaha yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Klasifikasi Rumah Padat Karya yang Tersebar di Kecamatan Kota Surabaya

No	Kecamatan	Jenis Usaha
1.	Sawahan	Slipper
2.	Jambangan	Budidaya Pertanian
3.	Sukomanunggal	Produksi Paving
4.	Gunung Anyar	Produksi Paving
5.	Pakal	Produksi Paving
6.	Krembangan	Budidaya Maggot
7.	Wonokromo	SABUN - Wani Wangi
	Wonokromo	SABUN - Wani Wangi
8.	Genteng	Kuliner
9.	Kalisari	Service AC

No	Kecamatan	Jenis Usaha
10.	Tambaksari	Produksi Paving
		Produksi Paving
11.	Gubeng	Café atau Barista
		Produksi Paving
12.	Lakarsantri	Budidaya Pertanian
13.	Tenggilis Mejoyo	Laundry
14.	Wonocolo	Jahit Seragam, Hijab dan vermak
		Cuci Kendaraan Service AC
14.	Wonocolo	Produksi Paving
15.	Kenjeran	Produksi Paving
		Produksi Paving
		Budidaya Peternakan Ayam, Perikanan, dan Pertanian
16.	Sambikerep	Laundry
		Cuci Kendaraan
		Café atau Barista
		Kuliner
17.	Mulyorejo	Laundry
		Cuci Kendaraan
		Service AC
		Café atau Barista
		Produksi Paving
		Jahit Seragam, Hijab dan vermak
18.	Benowo	Laundry
		Cuci Kendaraan
		Wahana
		Stan Mamin dan Lapak Ikan Segar
		Produksi Paving

Sumber: Pemerintah Kota Surabaya Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 2023

Keberhasilan program Rumah Padat Karya sebagai intervensi pengentasan kemiskinan bergantung pada kegigihan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan upaya mereka. Keluarga miskin dan sangat miskin tidak akan berubah jika mereka hanya sekedar berpangku tangan menerima bantuan. Masyarakat harus terus mengupayakan

kreativitas agar program pemerintah dapat mencapai efektivitas yang optimal dan maksimal. Namun jika dilihat dari implementasinya, masih banyak masyarakat yang menyalahkan tawaran dari Program Pemerintah ini. Sejalan dengan dengan yang tertulis dalam artikel kompas.id.

“...Dinas Sosial Surabaya pernah mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 219.000 Jiwa orang miskin di Surabaya. Sebanyak 19.600 di antaranya enggan menerima tawaran pekerjaan pada program padat karya. Padahal, program ini ditujukan kepada 19.500 keluarga miskin dan miskin ekstrem. “Itulah dampak negatif dari kebijakan negara yang sudah lama memberikan bantuan langsung tunai. Masyarakat miskin menjadi gagal menolong dirinya sendiri dan sangat bergantung pada bantuan tunai” ujar Bagong.”

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/17/surabaya-terusberjuang-untuk-merdeka-darikemiskinan?status=sukses_login&status_login=login. (Diakses pada tanggal 5 September 2023).

Program padat karya harus dilihat sebagai bantuan berupa aset produktif yang dapat dioptimalkan untuk mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan. Namun optimasi memerlukan perjuangan dan usaha yang tidak instan. Untuk mensukseskan itu, salah satu Program Padat Karya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya adalah pelatihan pembuatan paving. Salah satunya terhadap masyarakat Kecamatan Tambaksari. Rumah Padat Karya di Kecamatan Tambaksari tepatnya di Jalan Tambaksari No.11 menjadi Rumah Padat Karya Produksi Paving pertama kali yang didirikan di Kota Surabaya. Adi Gunita sebagai Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, menjelaskan di wilayah Kecamatan Tambaksari tepatnya di Jalan Tambaksari No.11, terdapat dua kelompok usaha

padat karya produksi paving yang pertama kali didirikan di Kota Surabaya. Pembuatan paving untuk kedua kelompok ini dimulai setelah adanya pelatihan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) pasca dua bulan. Hal ini sejalan dengan yang tertulis dalam artikel medcom.id.

“...Dari MBR itu, kami memberikan pelatihan pembuatan produksi paving, dan sudah terbentuk dua kelompok usaha bersama di Kecamatan Tambaksari. Sudah kita lakukan bantuan legalitas juga terkait dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/0k8aXRgK-wahpendapatanmbr-yang-ikut-padat-karya-di-surabaya-capai-rp7-jutabulan>. (Diakses pada tanggal 19 September 2023).

Selain legalitas, Pemerintah Kota membantu memfasilitasi upaya kelompok usaha padat karya paving untuk mendapatkan dukungan dan investasi dari BPR Surya Artha Utama, disebutkan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya air dan Bina Marga Kota Surabaya. Masing-masing kelompok beranggotakan enam orang akan memperoleh bantuan dana sebesar Rp. 15 juta yang akan dimanfaatkan kelompok padat karya paving untuk membelu material pengerasan jalan. Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan alat atau mesin untuk produksi paving hasil dari Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara untuk tempat produksinya, Kecamatan Tambaksari memanfaatkan lahan aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan yang tertulis dalam artikel medco.id.

“...Soal permodalan kami berhubungan dengan teman-teman di BPR Surya Artha Utama. Dari segi alat, kami sekarang bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menanyakan CSR dan sudah ada dua bantuan alat yang diberikan,” kata Adi. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/0k8aXRgK->

[wahpendapatanmbr-yang-ikut-padat-karya-di-surabaya-capai-rp7-jutabulan](#). (Diakses pada tanggal 19 September 2023).

Aset Pemerintah Kota Surabaya yang dapat dimanfaatkan di Wilayah Kecamatan Tambaksari sangat terbatas bahkan bisa dibilang tidak ada selain kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga Kecamatan Tambaksari memanfaatkan Rumah Padat Karya Produksi Paving di Kecamatan lain yang sudah jadi namun masyarakatnya tidak berminat ataupun memilih usaha Rumah Padat Karya lain seperti di Kecamatan Sukolilo. Pada awal Januari 2024 juga bertambah dengan dibentuk satu kelompok usaha padat karya paving masyarakat Kecamatan Tambaksari di Kecamatan Mulyorejo. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yudi Eko Handono, S.IP, M.IP. selaku Camat Tambaksari:

“...kita kan memang warganya banyak tapi kita tidak punya aset ya jadi sangat terbatas selain kantor kelurahan dan kecamatan, yang ada di kecamatan tambaksari ya itu satu saja yang di No 11 itu juga sebenarnya punya PU. Kalau bisa kan menggunakan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya. Karena kurang kita berupaya mencari di kecamatan lain yang sudah jadi lahannya tapi warga kecamatan setempatnya tidak berminat itu yang kita gunakan, yang kita gunakan ada 2 tempat satunya di Sukolilo satunya lagi di Mulyorejo tapi yang menggunakan ya warga Kecamatan Tambaksari. Karena kita kan banyak warganya jadi kita juga harus pintar-pintar nyari tempatnya.” (Hasil Wawancara tanggal 13 Maret 2024).

Adapun data Kelompok Padat Karya Paving Masyarakat Kecamatan Tambaksari diuraikan seperti berikut:

Tabel 1.3 Kelompok Padat Karya Produksi Paving Masyarakat Kecamatan Tambaksari

No	Lokasi	Tenaga Kerja	Kelompok Kerja
1.	Tambaksari BKTD Jl. Tambaksari No. 11	7	Tambaksari Maju Jaya: 4 Tambaksari Bersama Sejahtera: 3

No	Lokasi	Tenaga Kerja	Kelompok Kerja
2.	Tambaksari BKTD Jl. Keputih Tegal Taman (Samping Rusunawa Keputih)	8	Tambaksari Jaya Sentosa: 5 Tambaksari Ploso Dukuh Setro : 3
3.	Tambaksari BKTD Jalan Mulyorejo No. 102 (Belakang Kecamatan Mulyorejo)	5	Tambaksari Karya Sejahtera

Sumber: Kecamatan Tambaksari, Februari 2024

Dari tabel di atas, tenaga kerja yang terserap di Rumah Padat Karya Produksi Paving Masyarakat Kecamatan Tambaksari sudah cukup banyak dan berencana akan terus bertambah. Meskipun Kecamatan Tambaksari memiliki keterbatasan aset Pemerintah Kota Surabaya yang dapat dimanfaatkan namun masyarakat Kecamatan Tambaksari memiliki masyarakat yang masih mempunyai antusiasme tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hasil produksi paving nantinya akan digunakan untuk program perbaikan jalan di perkampungan. Dikarenaan berurusan dengan anggaran negara, maka kualitas produksi paving harus bagus. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) juga menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) untuk melakukan kontrol kualitas. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Adi Gunita, menyatakan ke depannya tidak menutup kemungkinan hasil produksi paving kelompok padat karya paving masyarakat Kecamatan Tambaksari dapat dipasarkan ke masyarakat umum karena standarnya juga sudah memenuhi kebutuhan pasar. Seperti yang tertulis dalam artikel JawaPos.com.

“Hasilnya memang di luar dugaan. Awalnya kami pasang target kualitas paving adalah K175. Namun, setelah dites, ternyata K300. Artinya, dilintas kendaraan besar pun masih kuat. “Kami akan bantu sampai ke sana. Harapannya, ke depan jumlah kelompok padat karya paving ini juga bertambah terus” ujar Kabid Jalan dan Jembatan DSDABM Adi Gunita.

<https://www.jawapos.com/features/01410522/kisah-mbr-yang-berhasil-dengan-program-padat-karya>. (Diakses pada tanggal 14 Januari 2024)

Rata-rata hasil produksi setiap kelompok tidak selalu menetap disesuaikan dengan kemampuan setiap kelompok. Dalam setiap bulan masing-masing kelompok mampu memproduksi sekitar 337M². Dalam 1M² jumlah pavingnya adalah 44 biji. Jadi hasil rata-rata setiap bulannya masing-masing kelompok mampu memproduksi sekitar 14.828 biji paving/bulan. (Koordinator Kelompok Paving Kecamatan Tambaksari). Sejak dimulai pada Juli 2022, produksi paving padat karya ini telah membuahkan hasil yang positif, misalnya per September 2022, omzet salah satu kelompok padat karya produksi paving di Kecamatan Tambaksari tembus Rp6-7 juta per orangnya. Menurut Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Adi Gunita secara analisa ekonomi, pendapatan dari padat karya produksi paving bisa mencapai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun kemampuan tersebut dapat ditingkatkan tergantung kinerja masing-masing kelompok.

Pemberdayaan masyarakat melalui program Rumah Padat Karya yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi penuh filosofi dan harapan besar. Yakni, bagaimana masyarakat Kota Surabaya bisa memperoleh pekerjaan dan mendapatkan pendapatan dengan cara gotong royong. Kecamatan Tambaksari yang memiliki keluarga miskin dengan jumlah terbanyak diantara 31

Kecamatan lainnya namun memiliki aset Pemerintah Kota Surabaya yang terbatas untuk dapat dimanfaatkan. Namun masyarakat Kecamatan Tambaksari memiliki antusiasme yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan bergabung pada Rumah Padat Karya Produksi Paving yang memanfaatkan Rumah Padat Karya Produksi Paving di Kecamatan lainnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai landasan dan referensi bagi penelitian ini. Penelitian terdahulu sangat penting sebagai sumber perbandingan dengan penelitian penulis saat ini. Penelitian Fadhilah dan Wahyudi (2023) yang dilakukan di Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo membuahkan hasil positif dan sesuai dengan teori yang ada, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan yang menyeluruh bagi pekerja Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif agar pekerja MBR tersebut lebih berdaya dan terlindungi oleh Pemerintah. Selanjutnya, penelitian Putricia dan Prathama (2023) yang dilakukan di Rumah Padat Karya Gubeng menunjukkan hasil bahwa belum tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat melalui program Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng karena terdapat 2 dari 9 tujuan pemberdayaan masyarakat yang belum terwujud, yaitu perbaikan lingkungan dan perbaikan kehidupan.

Sedangkan, penelitian Haryono dan Silviana (2023) menemukan bahwa tahap pemberdayaan masyarakat di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, belum sepenuhnya terlaksana, dan hanya dua dari empat tahap pemberdayaan yang dilakukan, dua tahap pemberdayaan telah

dilaksanakan yaitu proses pemberdayaan dan pemandirian masyarakat, sedangkan dua tahap pemberdayaan yaitu tahap pemberdayaan seleksi lokasi dan sosialisasi belum dilaksanakan dengan baik. Penelitian lain dari Dian dan Ma'ruf (2019) membuktikan bahwa Pemerintah Desa Plandaan telah berupaya maksimal dalam menjalankan tahap demi tahap pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memperkuat masyarakat meningkatkan daya beli masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Walaupun fokusnya serupa, perbedaan utamanya mencakup topik yaitu membahas mengenai Rumah Padat Karya yang masih sedikit penelitian dengan pembahasan tersebut. Selain itu perbedaan penelitian lainnya terletak pada lokus penelitian yaitu pada Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan periode waktu penelitian yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pemberdayaan dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Melalui Program Rumah Padat Karya Produksi Paving”**.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang dan informasi di atas dapat digunakan untuk merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Peneliti kemudian mengemukakan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Melalui Program Rumah Padat Karya Produksi Paving?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Melalui Program Rumah Padat Karya Produksi Paving.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, diharapkan manfaat dapat dihasilkan dari penelitian ini:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
 - a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada pembelajaran dan sebagai bahan pendamping bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terkait di masa mendatang.
 - b) Dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti dalam Program Studi Administrasi Publik.
2. Bagi Rumah Padat Karya Produksi Paving Masyarakat Kecamatan Tambaksari

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dan manfaat untuk proses pemberdayaan Masyarakat bagi Rumah Padat Karya Produksi Paving Masyarakat Kecamatan Tambaksari maupun Rumah Padat Karya lain sehingga dapat membawa dampak positif bagi Masyarakat di wilayah Kecamatan Tambaksari terutama membawa dampak baik bagi ekonomi dan taraf hidup masyarakat.

3. Bagi Mahasiswa

- a) Dapat meningkatkan pengetahuan tentang peran Program Rumah Padat Karya Produksi Paving dalam pemberdayaan masyarakat.
- b) Dapat digunakan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan teori atau informasi yang dipelajari dalam perkuliahan Program Studi Administrasi Publik.